

I.PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep pembangunan ekonomi mulai diperkenalkan secara global oleh Amerika Serikat dan sekutunya dengan membentuk sebuah Lembaga Bretton Wood.

Lembaga ini dibentuk untuk memberikan pinjaman kepada negara-negara untuk melakukan proses pembangunan. Pengenalan konsep ini dirasakan penting bagi Amerika Serikat demi untuk mengembangkan negaranya, dengan memajukan negara-negara yang berkembang agar dapat menopang kemajuan perekonomian negaranya.

Presiden Soeharto dengan konsep Repelitanya, menjalankan proses pembangunan secara bertahap di segala sektor, baik itu sektor pertanian, perkebunan, industri dsb. Proses bertahap yang menyita banyak waktu akhirnya memberikan hasil yang menggembirakan yakni adanya sebuah ketahanan pangan yang ditunjukkan dengan adanya swasembada pangan sehingga menjadikan negara Indonesia sebagai Macan Asia di era 90an, yang akhirnya memberikan eksistensi Indonesia di mata dunia.

Pembangunan secara bertahap tersebut mengharuskan adanya sebuah konskuensi yakni sebuah konskuensi pendanaan. Pendanaan yang telah dikeluarkan tersebut

membutuhkan dana yang besar yang telah di ambil dari APBN setiap tahunnya serta pinjaman dana dari pihak asing sebesar US\$ 171,5 Milyar, namun pendanaan yang besar untuk sebuah proses pembangunan tersebut harus berhenti di pertengahan 1998 yang disebabkan adanya sebuah krisis.

Kegagalan pemerintah dalam melakukan stabilisasi harga harus dibayar oleh pemerintah dengan bermuaranya krisis pada bidang kehidupan lain, yakni bidang ekonomi, sosial dan politik. Kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya, menimbulkan gejolak di beberapa wilayah Indonesia yang berencana untuk memisahkan diri dari NKRI.

Lahirnya Orde Refomasi merupakan salah bentuk manifestasi kegagalan pemerintah dalam melakukan pemberian hakikat pembangunan ekonomi seutuhnya. Pembangunan yang menekankan akan gaya sentralistik memberikan rasa kecemburuan di daerah lain yang merasakan tidak adanya sebuah rasa keadilan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam melakukan proses pembangunan.

Gaya sentralisasi yang memusatkan pembangunan pada sebuah wilayah menyebabkan wilayah lain terabaikan proses pembangunannya, sehingga berakibat adanya sebuah proses ketidakmerataan dan ketimpangan dalam menikmati proses pembangunan ekonomi.

Ketidakmerataan dalam menerima hasil pembangunan terjadi karena potensi ruang yang di miliki oleh daerah tidak dapat dinikmati untuk kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Otonomi merupakan sebuah langkah yang

dilakukan pemerintah dalam mengatasi ketidakmerataan yang terjadi di daerah, dengan melakukan pengolahan potensi yang ada dalam upaya menghasilkan pemangunan dan kesejahteraan bagi daerahnya.

Berdasarkan alasan tersebut, beberapa daerah mulai tertarik untuk mengajukan pembentukan daerah otonom baru bagi wilayahnya. Studi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bekerja sama dengan *United Nation Development Programme* (2008) menemukan bahwa terjadi peningkatan daerah otonom yang cukup signifikan sejak tahun 1999.

Pemerintah Provinsi telah bertambah dari 26 menjadi 34 provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota meningkat dari 303 menjadi 517 kabupaten/kota . rentang waktu 13 tahun, yang telah menghasilkan 222 daerah otonom baru.

Tabel 1 Pemekaran Daerah di Indonesia Periode 1999–2012

Tahun	Bulan	Jumlah Provinsi Baru	Jumlah Kabupaten Baru	Jumlah Kota Baru	Total
1999	Oktober	-	26	1	27
2000	Juni	2	-	-	2
	Oktober	1	-	-	1
	Desember	2	1	-	3
2001	Juni	-	-	12	12
2002	April		19	3	22
	Aktober	1			1
2003	Februari	-	9	3	12
	April	-	-17	-	17
	Mei	-	12	-	12
	Desember	-	23	-	23
2004	Oktober	1	-	-	1
2007	Januari	-	14	2	16
	Maret	-	1	-	1
	Agustus	-	6	2	8
2008	Januari	-	6	-	6
	Juli	-	5	-	5
2009			30	11	41
2012	Oktober	1	4	-	5
	Desember	-	12	-	12
Total		8	180	34	222

Sumber : BAPPENAS, 2013

Besarnya keinginan daerah untuk membentuk daerah otonom baru pasca dibentuknya Undang-Undang No.22/1999 disebabkan oleh keinginan daerah untuk ikut serta dalam memajukan dan mengembangkan potensi wilayahnya berdasarkan prakasa dan aspirasi sendiri.

Widjoyokusumo (2011) mengatakan bahwa secara teoritis, awal dari semangat pemekaran ini adalah merupakan suatu upaya untuk mencapai pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta demi mempercepat perwujudan masyarakat Indonesia yang sejahtera.

Alasan diatas jugalah yang melatarbelakangi adanya sebuah semangat pemekaran daerah di Provinsi Lampung, tercatat sebelum adanya otonomi daerah, Provinsi Lampung memiliki 7 kabupaten/kota. Kini sejak adanya era otonomi daerah telah bertambah 7 daerah otonomi baru (DOB) dari 7 kabupaten /kota induk. Berikut 6 kabupaten induk yang mengalami pemekaran daerah yakni

- a. Kabupaten Lampung Tengah yang menjadi induk adanya pemekaran daerah otonomi baru Kabupaten Lampung Timur, dan Kota Metro di tahun 1999
- b. Kabupaten Lampung Utara yang menjadi induk adanya pemekaran daerah otonomi baru di Kabupaten Tulang Bawang tahun 1997, dan Way Kanan pada tahun 1999
- c. Kabupaten Tulang Bawang yang menjadi induk adanya pemekaran daerah otonomi baru yakni Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji di tahun 2008.
- d. Kabupaten Lampung Barat yang menjadi induk adanya pemekaran daerah otonomi baru Kabupaten Pesisir Barat di tahun 2012.

e. Kabupaten Tanggamus yang menjadi induk adanya pemekaran daerah otonomi baru di Kabupaten Pringsewu

f. Kabupaten Lampung Selatan yang menjadi induk adanya pemekaran daerah otonomi baru Kabupaten Pesawaran di Tahun 2007

Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Memberikan sebuah kajian yang tidak hanya mengetahui potensi rill yang dimiliki kabupaten pemekaran tetapi juga dapat dipergunakan untuk menganalisis dampak yang terjadi dari timbulnya pemekaran daerah tidak hanya bagi daerah otonomi baru maupun bagi daerah induknya.

Daerah Otonomi Baru (DOB) dituntut meningkatkan pendapatan daerah secara mandiri oleh karena itu penggalian potensi ekonomi daerah dan penggunaan potensi yang tepat harus dilakukan, karena tanpa memperhitungkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah maka pengembangan pembangunan dan pendapatan daerah tidak akan mencapai hasil yang optimal atau sesuai dengan yang diharapkan.

Potensi ekonomi daerah merupakan kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber kehidupan rakyat setempat bahkan dapat menolong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan

Propinsi Lampung dengan adanya 7 daerah otonomi baru dari hasil pemekaran memiliki potensi ekonomi yang khas sesuai karakteristik daerahnya masing-masing sehingga akan mempunyai PDRB yang berbeda-beda pula.

Tabel 2 PDRB Atas Harga Konstan Kabupaten Induk dan Kabupaten Pemekaran Di Provinsi Lampung

No	Kabupaten induk/kabupaten pemekaran	PDRB Tahun 2009(Juta)	PDRB Tahun 2012(Juta)	PDRB /kapita 2009(Juta)	PDRB /kapita 2012(juta)	Laju Pertumbuhan (%)
1	Lampung selatan	4.114.980	4.906.298	4,563	5,261	6.30
	Tanggamus*	2.218.815	2.667.036	4,198	4,860	6.49
	Pesawaran*	1.572.794	1.887.427	3,592	4,320	6.42
2	Lampung tengah	5.883.047	7.006.637	5,068	5,873	6.37
	Lampung timur*	4.119.786	4.811.393	4,302	4,970	5.30
	Metro*	531.202	634.245	3,720	4,250	5.90
3	Lampung utara	3.194.205	3.781.781	5,470	6,359	6.03
	Tulang bawang*	2.129.602	2.548.776	5,363	6,205	6.93
	Way kanan*	1.340.230	1.570.458	3,339	3,783	5.67
4	Lampung barat Pesisir barat**	1.427.754	1.682.894	3,443	3,934	6.65
5	Tulang Bawang	2,129,602	2.512.465	5.477	5.857	5.50
	Tulang Bawang Barat*	1.064.633	1,272,176	4.290	4.972	6.10
	Mesuji*	1,180,841	1,405,733.	6.365	7.245	6.12
6	Tanggamus	2,224,935	2,667,036	4.186	4.735	6.41
	Pringsewu*	1,262,944	1,546,087	3.735	4.350	6.88

Sumber Data : BPS Lampung 2013

* kabupaten pemekaran

* mengalami pemekaran pada tahun 2012

Perbandingan regional antara kabupaten induk dan kabupaten pemekaran tahun 2009-2012 yang menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi positif, namun dari sisi aspek perkembangan PDRB kabupaten pemekaran mengalami kegagalan, rendahnya nilai PDRB kabupaten pemekaran dibandingkan dengan kabupaten induknya dengan kata lain pemaksimalan potensi ekonomi tidak berjalan dengan optimal.

Peraturan Daerah No 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Provinsi Lampung yang mengatur akan perencanaan pemanfaatan potensi ruang

di Provinsi Lampung. Menjelaskan bahwa hampir sebagian besar kabupaten pemekaran yang saat ini menjadi daerah Pusat Kegiatan Wilayah Promosi(PKWp) direkomendasikan menjadi PKW 5 tahun ke depan. Oleh karena itu perlulah untuk mengetahui daerah kabupaten pemekaran yang direkomendasikan menjadi Pusat Kegiatan Wilayah yakni (Kabupaten Pesawaran, Waykanan, Lampung Timur, Tulang Bawang Barat, Pringsewu) untuk dianalisis potensinya serta melakukan indentifikasi sektor-sektor ekonomi kabupaten pemekaran sebagai pedoman dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah otonomi baru tersebut .

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat latarbelakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka masalah yang akan dikaji adalah :

1. Di tiap kabupaten pemekaran sektor mana yang mempunyai potensi sebagai sektor basis dengan bantuan alat analisis *location quetion* (LQ)
2. Di tiap kabupaten pemekaran sektor mana yang mempunyai keunggulan kompetitif atau daya saing dan spesialisasi dengan bantuan alat analisis *shiftshare* dan Model Rasio Pertumbuhan (MRP)?
2. Sektor mana yang dapat digunakan untuk memacu pengembangan pembangunan dengan memanfaatkan alat analisis Tipologi klassen ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi ekonomi dan mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi di masing-masing Kabupaten/Kota di wilayah Lampung dengan cara :

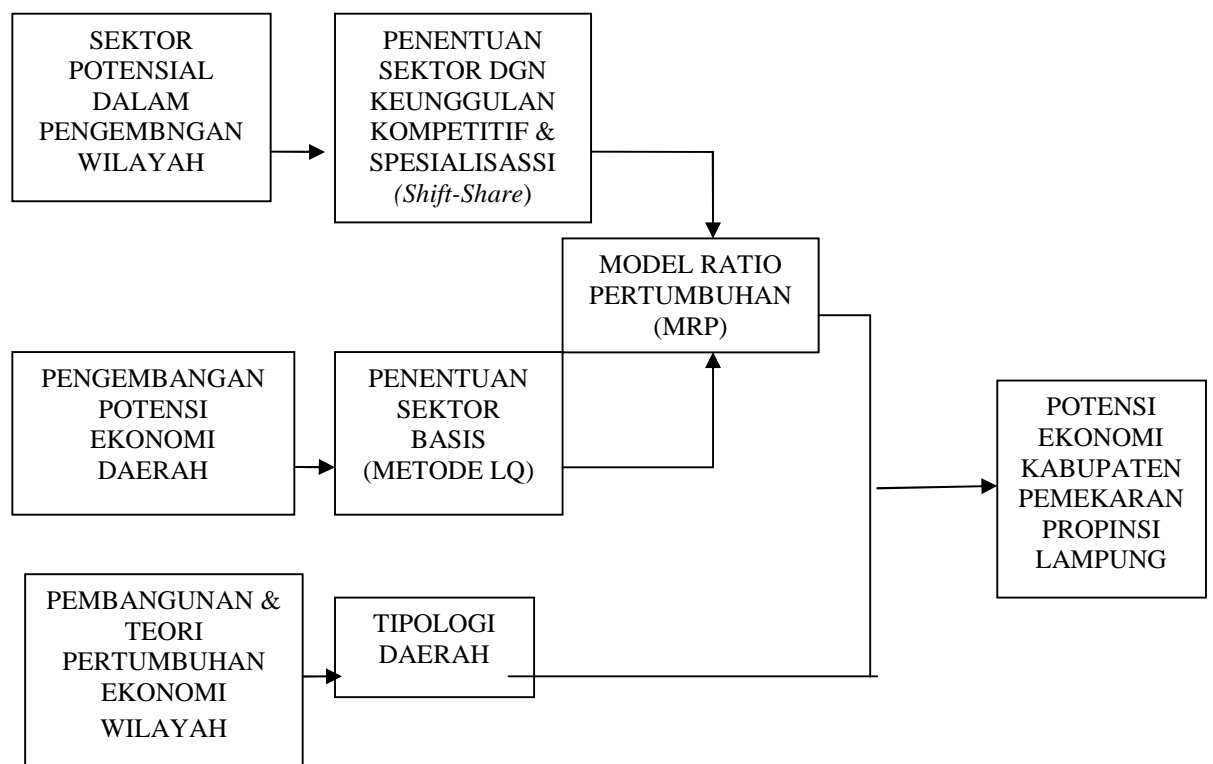
1. Mengetahui sektor-sektor basis/unggulan di tiap Kabupaten pemekaran (LQ)
2. Mengidentifikasi dan menganalisis kinerja sektor-sektor ekonomi di masing-masing daerah terutama untuk mengetahui sektor-sektor yang mempunyai daya saing kompetitif dan spesialisasi *shift share* dan Model Rasio Pertumbuhan (MRP)
3. Menganalisis tipologi sektoral di tiap daerah berdasarkan potensi yang dimilikinya.()

D.Kerangka Pemikiran

Suatu daerah memiliki potensi ekonomi dapat terlihat dari besarnya PDRB yang dihasilkan, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita. Dari PDRB akan dapat diketahui output yang dihasilkan tiap sektor serta digunakan untuk menentukan sektorbasis dan sektor yang mempunyai keunggulan kompetitif dan spesialisasi. Dari pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita dapat diketahui Tipologi daerah.

Untuk menentukan sektor basis dalam perencanaan pengembangan pembangunan daerah digunakan pengaruh variabel keunggulan kompetitif, spesialisasi dan pertumbuhan ekonomi persektor terhadap sektor basis yang signifikan dan disesuaikan dengan tipologi daerah yang bersangkutan.

Perencanaan pembangunan suatu daerah haruslah disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah bersangkutan dan inilah kunci keberhasilan program pengembangan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan itu harus mempertimbangkan sumberdaya yang dapat dikembangkan tidak hanya sektor basis akan tetapi juga mempunyai keunggulan kompetitif dan spesialisasi sehingga mampu bersaing dengan daerah lain sekitarnya. Variabel lain yang perlu dipertimbangkan adalah tipologi daerah itu sendiri.



Gambar 1 Kerangka Pemikiran Teoritis